BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

Kota Cimahi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat Luas wilayah Kota Cimahi seluruhnya adalah 4.025,73 Ha, yang secara administratif terdiri atas tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk 2000 sebanyak 42.549 jiwa dengan kepadatan penduduk 110 jiwa/Ha dan pertambahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (1997-2000) rata-rata 2,27% per tahun.

Kota Cimahi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi. Ketentuan ini merupakan bagian satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi kota yang berdiri sendiri. Peningkatan status pemerintah ini disamping diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, juga untuk mengembangkan wilayah dan potensi yang telah dimiliki Kota Cimahi secara mandiri.

Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan sebagai penggerak roda pembangunan nasional memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan nasional secara merata yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan di seluruh tanah air, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat telah memperlancar serangkaian tindakan mendasar dengan memberikan wewenang seluas-luasnya (otonomi daerah) kepada

pemerintah daerah untuk mengembangkan masing-masing daerahnya yang dapat mempengaruhi peningkatan angka penerimaan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pemerintah kota dalam meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu sistem informasi yang tangguh dan dapat diandalkan, sehingga manajemen dituntut untuk menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendukung pencapaian tujuan pemerintah kota. Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam tercapainya suatu tujuan. Tanpa tenaga, pikiran dan kerja sama dari para pegawai maka kegiatan pemerintah kota tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik maka pemerintah kota harus dapat merekrut pegawai yang cakap dan handal dan berusaha untuk memotivasi kerja para pegawai. Salah satu cara meningkatkan motivasi kerja pegawai yaitu dengan memberikan sauatu penghargaan atas prestasi yang disumbangkanya kepada pemerintah kota dan melakukan pembayaran gaji, di mana besar kecilnya gaji tidak terlepas dari tinggi atau rendahnya pangkat (golongan atau jabatan) maupun lamanya masa bekerja. Pemerintah kota dalam melaksanakan hal tersebut dituntut untuk menciptakan suatu pengelolaan gaji yang baik, dan membuat suatu kebijakan serta prosedur yang tepat dalam pendistribusian gaji pada para pegawai, sehingga diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi pemerintah kota tersebut.

Kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil secara umum diatur dengan Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Jumlah tersebut adalah jumlah kotor, karena belum dikurangi dengan potongan-potongan dan setiap

pegawai tidak sama dalam menerima gaji tersebut tergantung pada lamanya masa kerja pegawai tersebut memberikan jasanya di Pemerintah Kota Cimahi.

Adapun prosedur penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan daftar gaji,daftar rekapitulasi gaji dan melakukan penghitungan gaji.
2. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SSP)
3. Menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM).
4. Dilaksanakan pembukuan terhadap SPM dan pencairan uang
5. Pencocokan SPM dari pihak bank yang akan mencairkan uang
6. Setelah uang diterima stuk gaji piun dibuat dan diakukan pemindah bukuan dan gaji pun diberikan kepada pegawai yang bersangkutan
7. Pegawai yang menerima gaji menandatangani daftar penrimaan gaji
8. Penyusunan Surat Peranggungjawaban (SPJ) untuk pihak Bank yang telah mencairkan uang
9. Bendaharawan gaji membua laporan penggajian, yang terdiri dari Laporan Pekapitulasi SPM Gaji Aparatur dan Publik dan Laoran Realisasi Gaji.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini diberi judul ”PERANAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI”

1.2 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pada sistem akuntansi penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui prosedur penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian ini baik yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti maupun literatur diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan serta masyarakat secara umum.

1. Bagi penulis

Penelitiaan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang Prosedur Pengajian pada Pemerintah Kota Cimahi.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi manajemen perusahaan yang berhubungan dengan Prosedur Pengajian pada Pemerintah Kota Cimahi menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

3. Bagi pihak Lainnya

Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai pelaksanaan Prosedur Penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam penyusunana laporan kerja praktek ini penulis melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Cimahi yang berlokasi di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telp (022) 6631859, sedangkan waktu kerja prakek yang dilaksanakan dalam satu periode penuh yaitu dari tanggal 2 Juli 2010 sd 5 Agustus 2010. Hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin sampai Jumat dan waktu pelaksanaaan Kegiatan Kerja Praktek dimulai pukul 08.30 sampai 15.00.